



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

RUU Cipta Kerja dan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan

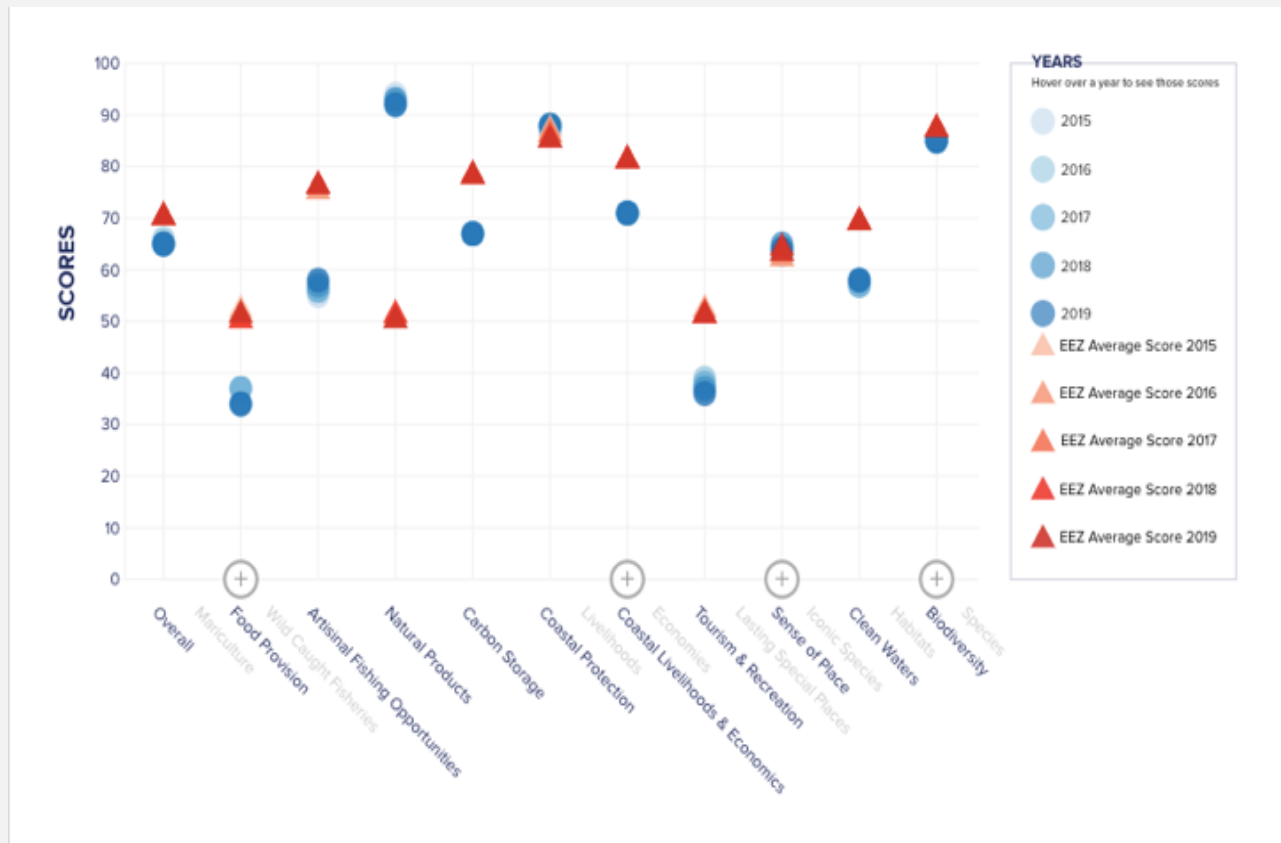
Stephanie Juwana
Director of International Engagement and Policy Reform
Indonesia Ocean Justice Initiative

Mohon untuk tidak mengutip tanpa izin atau tidak mencantumkan sumber

Berbagai Ancaman di Sektor Kelautan & Perikanan

- *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* oleh kapal asing maupun kapal Indonesia
- Perusakan daerah *mangrove*
- Reklamasi yang mengancam kelestarian lingkungan laut
- Pencemaran akibat aktivitas pemanfaatan ruang laut yang tidak bertanggung jawab
- Perusakan terumbu karang
- Polusi sampah plastik
dan lain lain...

KONDISI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA



- **Ocean Health Index**

- Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 221 negara dengan skor 65 (dari 100)

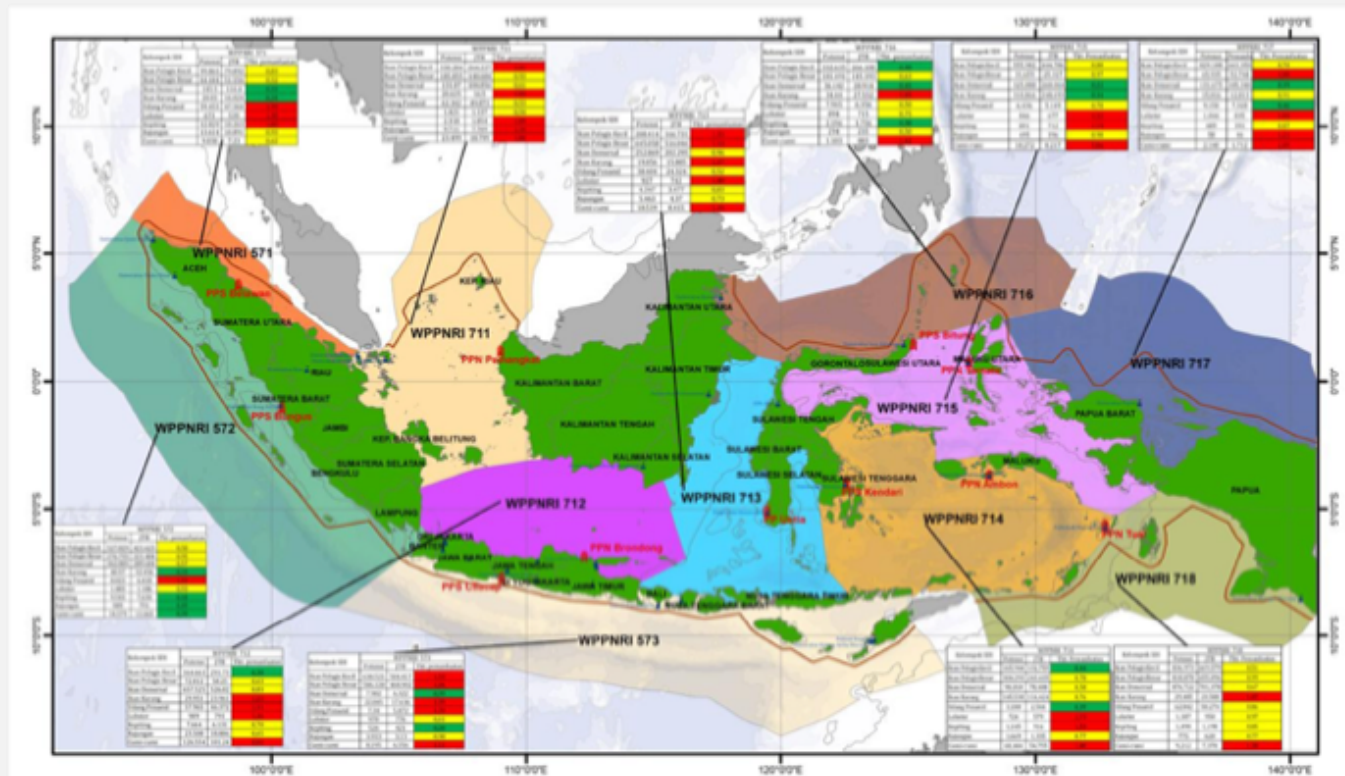
KONDISI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA

- **Kondisi Terumbu Karang, Padang Lamun, dan *Mangrove***
 - Berdasarkan hasil peninjauan kondisi terumbu karang di 1.067 sites di Indonesia tahun 2017, ditemukan bahwa 36.18% ada pada kondisi buruk, 34.3% kondisi *moderate*, 22.96% kondisi baik, dan 6.56% kondisi sangat baik.
 - Di tahun 2017, secara umum persentase tutupan lamun di Indonesia yang dihitung dari 166 stasiun pengamatan adalah 41,79%. Dengan presentase tersebut, maka status padang lamun di Indonesia termasuk dalam kondisi kurang sehat.
 - Di tahun 2017, sebesar 1.671.140,75 ha *mangrove* ada pada kondisi baik, sementara 1.817.999,93 ha kondisinya tidak baik.

KONDISI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA

- **Perikanan di Indonesia**

- Jumlah potensi sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) sebesar 12.541.438 ton. Akan tetapi, beberapa komoditas perikanan di beberapa WPP NRI ada pada kategori merah (over-exploited).



Apa **Kunci** untuk Menjamin Keberlanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan

01

Pengelolaan yang berbasis *sustainable management* dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

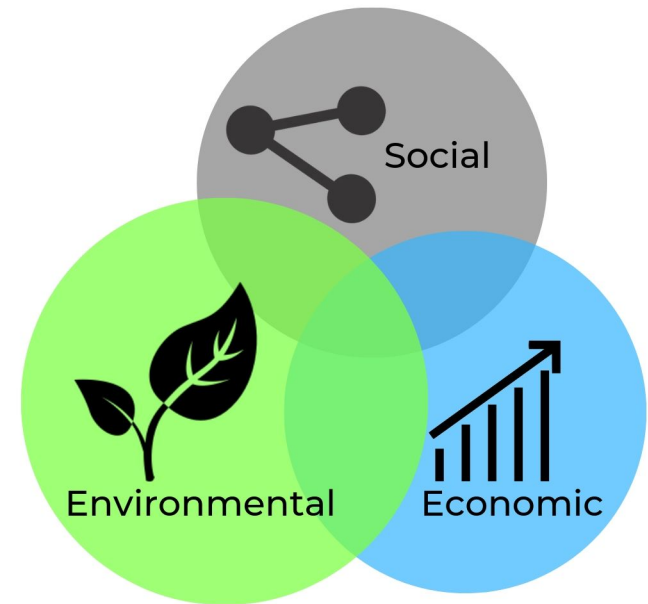
02

Pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif

03

Kesadaran dan partisipasi masyarakat

SUSTAINABLE DEVELOPMENT



1. The role of humans.	8. Reduction of Unsustainable Patterns of Prod. and Consumption	15. Precautionary principle	22. Ind. Peoples have a Vital Role
2. State sovereignty	9. Capacity Building for Sust. Development	16. Internalization of Environmental Costs	23. People under Oppression
3. The Right to development	10. Public participation	17. Environmental Impact Assessments	24. Warfare
4. Environmental Protection in the Dev. Process	11. National Environmental Legislation	18. Notification of Natural Disaster	25. Peace, Development and Environmental Protection
5. Eradication of Poverty	12. Supportive and Open International Economic System	19. Prior and Timely Notification	26. Resolution of Environmental Disputes
6. Priority for the Least Developed	13. Compensation for Victims of Pollution and other Envir. Damage	20. Women have a Vital Role	27. Cooperation between State and People
7. State Cooperation to Protect Ecosystem	14. State Cooperation to Prevent environmental dumping	21. Youth Mobilization	

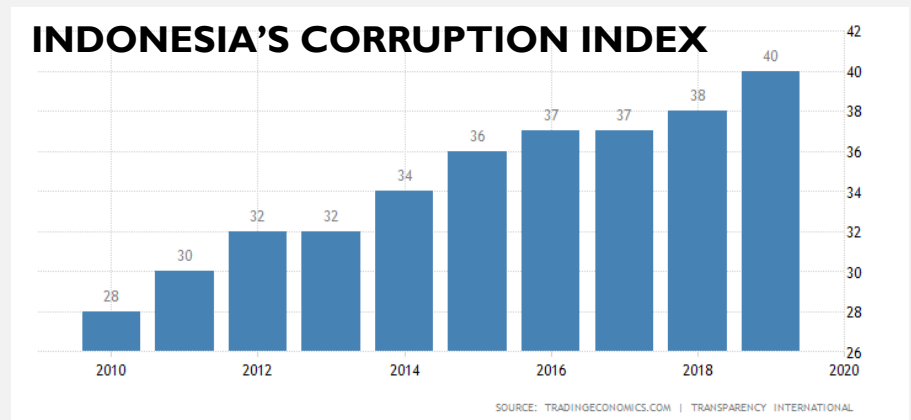
PERUBAHAN YANG DIATUR OLEH RUU CIPTA KERJA

Perencanaan	Pemanfaatan	Pengawasan dan Penegakan Hukum
<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan tata ruang2. AMDAL3. Komnas Kajiskan	<ol style="list-style-type: none">1. RBA2. Simplifikasi dan penghapusan beberapa izin3. Penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan2. Pengutamaan sanksi administratif3. Penambahan sanksi pidana4. Definisi nelayan kecil

IMPLIKASI

I. Kelembagaan dan *governance* yang belum siap dapat memperburuk perekonomian Indonesia

- Jika *good governance* tidak diaplikasikan, sentralisasi kewenangan dapat menyebabkan *abuse of power*
- Tanpa *good governance*, sentralisasi kewenangan ini dapat menyebabkan buruknya pelayanan publik



IMPLIKASI

- I. **Kelembagaan dan *governance* yang belum siap dapat memperburuk perekonomian Indonesia**
 - Sistem *risk-based approach* harus didukung dengan kelembagaan yang kuat dan kredibel
 - Tantangan RBA: kapasitas lembaga penilai, pengumpulan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan, kriteria dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi publik

IMPLIKASI

2. Orientasi ke *sustainability* yang tidak kuat menghambat pembangunan berkelanjutan

- Izin lingkungan menjadi persetujuan → pengurangan esensi *preventative principle*?
- Komnas kajiskan dihapus → pengurangan esensi *best scientific evidence available*?

- Pasal 33 (3) UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
- Pasal 33 (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip ... berkelanjutan, berwawasan lingkungan ...”

Sektor Kelautan dan Perikanan dan Sustainable Development Goals

Beberapa target SDG 14 (*life below water*) seharusnya tercapai di tahun 2020.

SDG14 – Life Below Water

Mean area that is protected in marine sites important to biodiversity (%)	27.7	●	→
Ocean Health Index Goal-Clean Waters (0-100)	55.8	●	→
Percentage of Fish Stocks overexploited or collapsed by EEZ (%)	21.7	●	↑
Fish caught by trawling (%)	36.9	●	↓

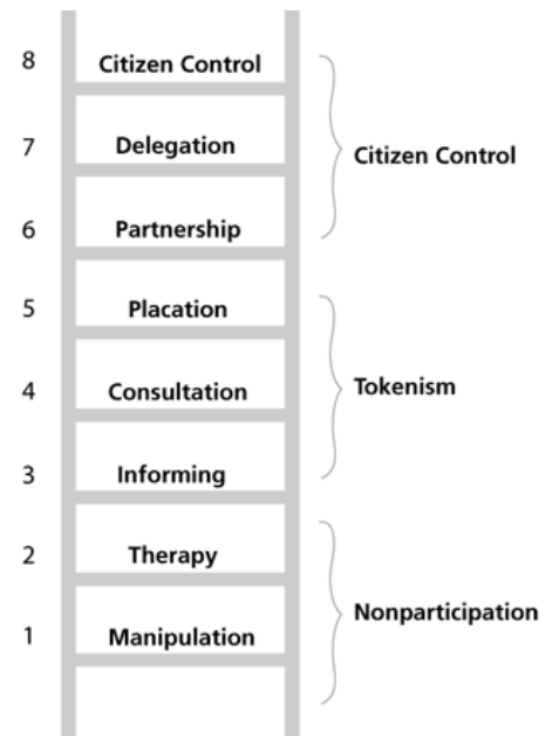
Di sisi lain, terdapat SDGs lainnya yang perlu juga diperhatikan pemenuhannya: SDG 2 “zero hunger”, SDG 8 “decent work and economic growth”, SDG 12 “responsible consumption and production”, SDG 14 “life below water”, dan SDG 16 “peace justice and strong institutions”



IMPLIKASI

3. Berkurangnya pelibatan masyarakat dan keberpihakan terhadap masyarakat termarginalkan/yang perlu dilindungi

- *Democracy Index* Indonesia menurun cukup drastis sejak 2017
- Komisi penilai AMDAL dihapus dan masyarakat yang dapat terlibat pada penyusunan AMDAL dibatasi
- Definisi nelayan kecil tidak memberikan kepastian hukum
- Tidak ada penguatan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil, petambak garam, pembudidaya kecil, ABK



Arnstein's Ladder (1969)
Degrees of Citizen Participation

IMPLIKASI

4. Efektivitas penegakan hukum dapat melemah

	NIB	Sertifikat Standar	Izin
Low Risk	v		
Medium Risk	v	v	
High Risk	v	v	v

Bagaimana bentuk pengawasannya?

Izin sebagai instrumen kontrol?

Apakah pemerintah pusat akan memegang peran pengawasan sendiri?

IMPLIKASI

4. Efektivitas penegakan hukum dapat melemah

- Usaha *medium-risk* jika tanpa pengawasan sama sekali dapat menimbulkan resiko besar
- Lemahnya pengawasan kepatuhan

Kerugian ekonomi yang Indonesia alami akibat praktik *IUU fishing*:

**USD 4
billion**

Di tahun 2018,

1.636

kapal

melanggar wilayah penangkapan

Berdasarkan perbaikan laporan usaha 2017-2018, terdapat

1,2 juta ton

ikan yang sebelumnya tidak dilaporkan

IMPLIKASI

3. Efektivitas penegakan hukum dapat melemah

- Tidak ada indikator yang jelas untuk penentuan sanksi administratif dan pidana
- Apakah penjatuhan sanksi administratif berupa denda dapat menjamin efektivitas hukum?
- Penjatuhan sanksi administratif jangan sampai melupakan kejahatan lainnya yang terkait

Sanksi Denda Administratif	Sanksi Pidana	Besaran ancaman denda administratif untuk kapal Indonesia dan kapal asing yang melakukan <i>illegal fishing</i> SAMA
Kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan tanpa izin	Kapal pengangkut ikan asing melakukan pengangkutan tanpa izin	
Menangkap ikan tanpa izin	Tidak menyimpan alat tangkap di palka	

Penegakan Hukum *yang* *Efektif*

Code of Conduct for Responsible Fisheries oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) mengatur bahwa negara harus memastikan adanya pengaturan sanksi terhadap suatu pelanggaran hukum yang setara dengan besarnya (severity) dampak yang timbul dari tindakan tersebut.

01

- *Is the offence terminated?* (Apakah pelanggaran tersebut sudah dihentikan?)
- *Are harmful effects of the offence restored?* (Apakah akibat yang membahayakan dari pelanggaran tersebut dapat dikembalikan seperti keadaan semula?)
- *Did offenders reiterate e.g. did the prosecutors offices or administrative authorities repeat enforcement efforts?* (Apakah pelaku pelanggaran mengulangi perbuatannya, misal, apakah aparat penegak hukum administrasi mengulangi upaya penegakan hukum?)
- *Can transformation of the behavior of the offender be determined (compliance)?* (Apakah terdapat perubahan perilaku perusahaan pasca penjatuhan sanksi administratif (kepatuhan ketaatan)?)

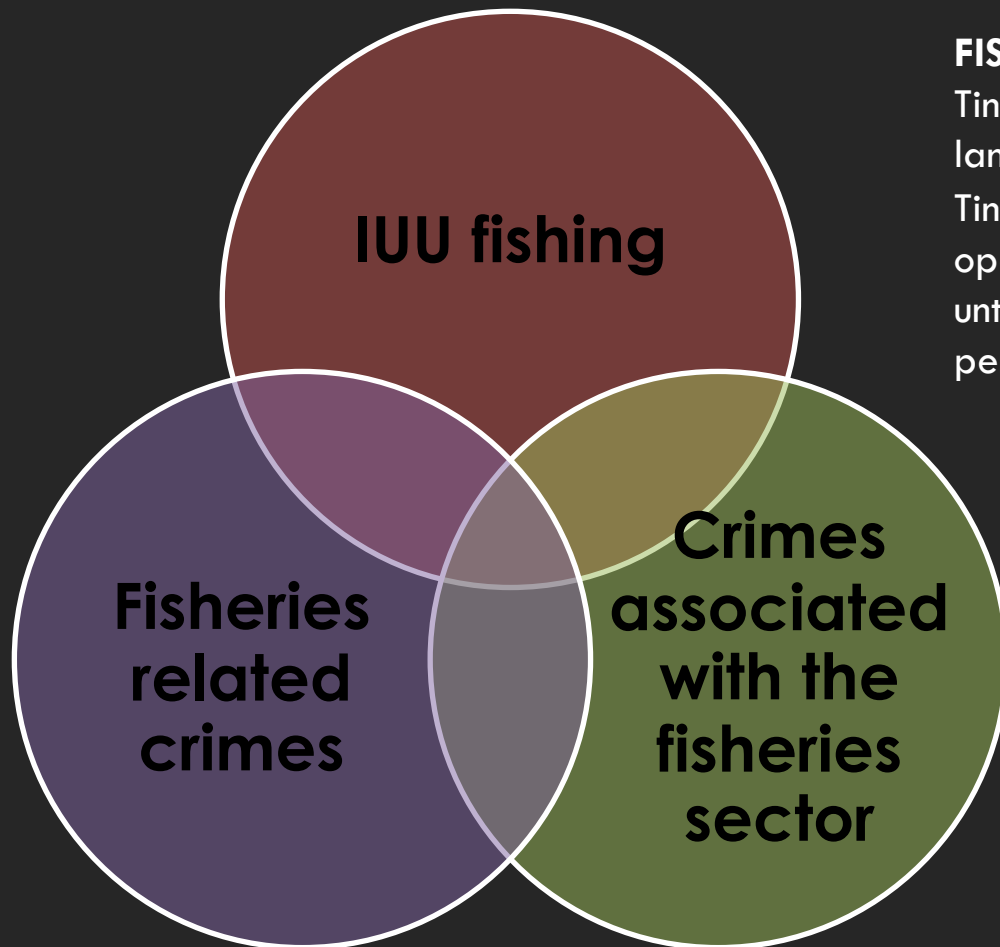
Winter & de Rider 2006

02

- *Aim to change the behavior of offender*
- *Aim to eliminate any financial gain or benefit from non-compliance*
- *Be responsive and consider what is appropriate for the particular offender and regulatory issue, which can include punishment and the public stigma that should be associated with a criminal conviction;*
- *Be proportionate to the nature of the offence and the harm caused;*
- *Aim to restore the harm caused by regulatory non-compliance, where appropriate; and*
- *Aim to deter future non-compliance*

Macrory

Jangan Sampai Sanksi Administratif Mengesampingkan Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Terkait



FISHERIES-RELATED CRIMES

Tindak pidana yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan penangkapan ikan. Tindak pidana ini dilakukan untuk melancarkan operasi *IUU fishing* dan untuk mendapat untung yang lebih banyak dari kegiatan penangkapan ikannya.

CRIMES ASSOCIATED WITH THE FISHERIES SECTOR

Tindak pidana yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan penangkapan ikan, tetapi menggunakan kegiatan penangkapan ikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Pertanggung jawaban Pidana Korporasi

RUU Cipta Kerja tidak berubah pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Perikanan, padahal ketentuannya mengandung kelemahan.

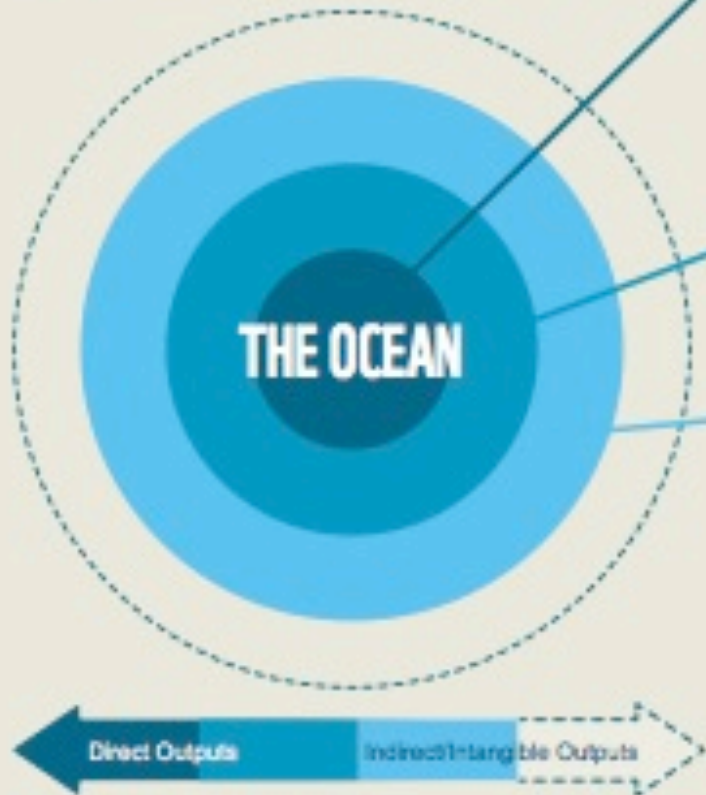
Selain itu, bagaimana untuk pengaturan yang diubah menjadi sanksi administratif?



OCEAN ASSET VALUES

FIGURE 1 - GLOBAL OCEAN ASSET VALUE

The ocean provides wide-ranging value, from food and tourism to coastal protection and much more.



OCEAN-RELATED ACTIVITIES AND ASSETS

TOTAL VALUE

Direct output of the ocean from:

- 
 Marine fisheries
- 
 Mangroves
- 
 Coral reefs
- 
 Seagrass

US\$**6.9**tn

Trade and transport:

-  Shipping lanes

US\$**5.2**tn

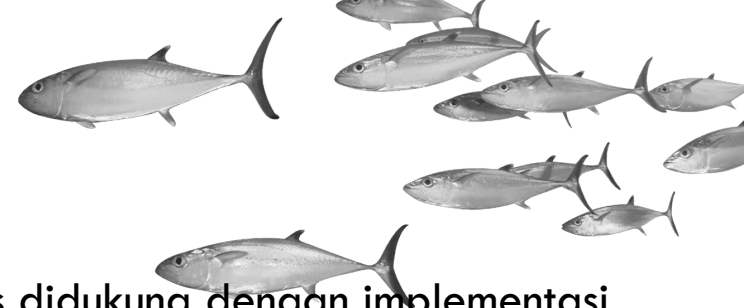
Adjacent assets:

-  Productive coastline
-  Carbon absorption

US\$**7.8**tn

US\$**4.3**tn

Kesimpulan



- Perubahan-perubahan pada RUU Cipta Kerja harus didukung dengan implementasi *good governance*, kesiapan kelembagaan, kualitas aparat penegak hukum, perbaikan birokrasi, dan kultur masyarakat.
- Nuansa *sustainability* yang tidak diprioritaskan di RUU CK dapat mempengaruhi performa Indonesia dalam mencapai *SDG targets*.
- Partisipasi publik adalah sebuah *constitutional imperative*, maka tidak dapat dikurangi
- Masih adanya kerancuan pada pengaturan RUU Cipta Kerja dapat menghambat tercapainya efektivitas penegakan hukum.

Saran

Penyusun RUU harus benar-benar mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang harus dicapai, namun orientasinya harus pada pembangunan berkelanjutan. Solusi yang diberikan oleh penyusun UU harus sesuai dengan permasalahan yang ada dan jangan justru mengorbankan hal-hal yang tidak menjadi permasalahan.